



PERMUDAH: Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat meninjau gelaran Bazar Perizinan dan URC Konsultasi PBG di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota, kemarin (2/6).

Pemkot Buka Bazar Perizinan Urai Antrean

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tampaknya masih menjadi barang yang jamak dikeluhkan. Saat ini, tercatat ada ratusan berkas permohonan izin pendirian bangunan milik masyarakat yang masih mandeg dan belum rampung diverifikasi oleh instansi terkait.

Guna mengurai hal itu, Pemkot Yogyakarta menggelar Bazar Perizinan dan Unit Reaksi Cepat (URC) Konsultasi PBG di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Jogja. Agenda yang menjadi rangkaian menyambut

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemkot Yogyakarta itu bakal digeber selama tiga hari ke depan, terhitung mulai Selasa (2/6) hingga Kamis (4/6).

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo tak menampik adanya tumpukan dokumen perizinan yang belum kelar. Pihaknya kini tengah melakukan pemetaan dan klasifikasi ketat terhadap ratusan berkas yang masuk, guna mengetahui kepastian status dokumen para pemohon.

“Kami sedang memetakan ratusan izin yang masih berproses. Klasifikasinya memakai sistem zonasi warna.

■ Baca **PEMKOT...** Hal II

Pemkot Buka Bazar Perizinan Urai Antrean

sambungan dari hal Joglo Jogja

Mulai dari kategori hijau yang sudah siap terbit, kuning yang butuh perbaikan, hingga merah yang memerlukan evaluasi mendalam baik dari pemohon atau dinas terkait,” beber Hasto di sela meninjau MPP Balai Kota Jogja, kemarin (2/6).

Berdasarkan hasil pemetaan awal, terdeteksi ada sekitar 22 dokumen PBG yang sebetulnya sudah masuk zona hijau, namun surat keputusannya belum kunjung diterbitkan. Hasto pun langsung mematok target tinggi. Selama tiga hari pelaksanaan bazar itu, puluhan izin berkategori hijau tersebut harus sudah berpindah tangan ke masyarakat.

“Saya minta yang sudah masuk zona hijau segera

dikeluarkan izinnya. Kalau memang tidak ada masalah lagi, buat apa ditunda? Ini komitmen kami untuk memangkas waktu birokrasi,” cetus Hasto.

Lebih lanjut diungkapkan, titik sumbat utama yang membuat antrean PBG mengular panjang berada pada fase penilaian teknis. Tahapan verifikasi lapangan dan penilaian ahli ini dinilai lamban, sehingga menumpuk ratusan berkas antrean.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengamini, mata rantai pengurusan PBG memang cukup kompleks. Regulasi mewajibkan pemohon meloloskan berbagai aspek, mulai dari tata ruang,

kelayakan lingkungan, analisis dampak lalu lintas (andalalin), proteksi kebakaran, hingga rekomendasi dari sisi cagar budaya. Kerumitan inilah yang kerap membuat warga kebingungan karena menerima informasi yang sepotong-sepotong.

Melalui kembang bazar terpadu ini, seluruh dinas teknis pengujian dihadirkan langsung dalam satu meja di MPP. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung bertatap muka dan mendapat kejelasan utuh soal kekurangan dokumen mereka.

Budi membeberkan, jika merujuk pada basis data sistem, sedianya ada sekitar 900 permohonan PBG yang mengantre. Namun, setelah ditelisik, banyak ditemukan adanya akun ganda (double

account), berkas yang telanjur ditinggalkan pemohon, hingga dokumen yang tidak lengkap.

“Setelah kami pilah secara riil, jumlah berkas menumpuk yang benar-benar aktif dan membutuhkan penyelesaian segera ada di kisaran 500 berkas,” ungkap Budi.

Langkah jemput bola ini pun langsung diserbu masyarakat. Baru hari pertama dibuka, antrean warga yang berkonsultasi melonjak drastis dari rata-rata harian yang biasanya hanya berkisar 80 orang.

“Hingga siang tadi pukul 12.30 WIB, tercatat sudah ada 110 warga yang memanfaatkan layanan URK ini, dan angkanya diprediksi terus bertambah,” pungkasnya. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005